Jurnal Ruang Sosialia
Volume 02, Number 01, 2026 pp. 253-267
Open Access:

Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi: Analisis Kritis terhadap Struktur Patriarki dan Kekuasaan di Indonesia

Nurul Mutmainnah[1*]

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLEINFO

Article history:
Received Desember 23, 2025
Revised Desember 23, 2025
Accepted Januari 25, 2026
Available online April 03, 2026

Kata Kunci:
Perempuan; Patriarki; Pengambilan Keputusan Ekonomi; Kesetaraan Gender

Keywords:
Women; Patriarchy; Economic Decision-Making; Gender Equality

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai indikator substantif keberdayaan perempuan. Meskipun partisipasi ekonomi perempuan menunjukkan peningkatan, berbagai kajian menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum secara konsisten diikuti oleh kewenangan perempuan dalam menentukan keputusan ekonomi, baik di tingkat rumah tangga maupun ruang publik. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif melalui sintesis kritis terhadap penelitian nasional dan internasional yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif keberdayaan, relasi kuasa gender, serta konteks kebijakan pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individual, melainkan dipengaruhi oleh struktur patriarki, norma sosial yang melanggengkan dominasi laki-laki, serta kebijakan pemberdayaan yang cenderung bersifat instrumental dan belum transformatif. Artikel ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat direduksi pada peningkatan partisipasi kerja atau akses sumber daya semata, tetapi harus mencakup penguatan agensi dan transformasi relasi kuasa dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Temuan ini berkontribusi pada penguatan kajian gender dan pembangunan dengan menempatkan pengambilan keputusan sebagai indikator kunci keberdayaan perempuan.

ABSTRACT

This article examines women's involvement in economic decision-making as a substantive indicator of women's empowerment. Although women's economic participation has increased, existing studies indicate that such progress has not been consistently accompanied by greater authority in economic decision-making at both household and public levels. This study employs a qualitative literature review approach by critically synthesizing relevant national and international studies. The analysis integrates perspectives on empowerment, gendered power relations, and development policy contexts. The findings reveal that women's limited role in economic decision-making is not merely an individual issue but is deeply shaped by patriarchal structures, social norms that legitimize male dominance, and empowerment policies that remain largely instrumental rather than transformative. This article argues that women's economic empowerment cannot be reduced to labor force participation or access to resources alone; instead, it must involve the strengthening of women's agency and the transformation of power relations within economic decision-making processes. By foregrounding decision-making as a key dimension of empowerment, this study contributes to gender and development scholarship.

*Corresponding author
E-mail addresses: nurulmutmainnah640@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perempuan memainkan peran yang signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia, namun peran tersebut tidak selalu setara sering kali dibatasi oleh struktur sosial yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa struktur patriarki dalam keluarga dan masyarakat Indonesia sering membatasi peluang perempuan dalam keterlibatan ekonomi dan pengambilan keputusan, baik pada level rumah tangga maupun publik, sehingga perempuan seringkali ditempatkan sebagai pelengkap daripada sebagai pengambil keputusan utama dalam urusan ekonomi keluarga dan masyarakat. Studi empiris juga mengungkap bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga masih tinggi, mencerminkan struktur kekuasaan yang hierarkis dan berimplikasi pada akses perempuan terhadap sumber daya dan kontrol terhadap keputusan ekonomi.

Dalam Konteks akademik, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi bukan hanya merupakan indikator partisipasi ekonomi semata, tetapi juga cerminan dari derajat kesetaraan gender yang lebih luas dalam masyarakat. Penelitian yang mengkaji pemberdayaan perempuan dan keputusan rumah tangga menemukan bahwa status sosial ekonomi perempuan termasuk pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan berkontribusi signifikan terhadap kemampuan mereka mempengaruhi keputusan dalam keluarga, yang pada gilirannya berkaitan erat dengan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih luas di Indonesia. Kajian gender dan ekonomi menerankan bahwa tanpa transformasi terhadap norma budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat, pengambilan keputusan ekonomi oleh perempuan akan terus dibatasi oleh aturan tidak tertulis yang memperkuat subordinasi gender.

Transformasi semacam itu penting karena keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi berdampak pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa studi menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi ekonomi perempuan berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pengentasa kemiskinan, menandakan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya masalah keadilan sosial, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi makro. Studi lain menegaskan bahwa indeks pemberdayaan gender dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih inklusif, meskipun tantangan struktural seperti stereotip gender dan hambatan akses masih perlu diatasi secara sistematis.

Patriarki sebagai sistem norma budaya yang menempatkan laki-laki di posisi dominan menjadi salah satu hambatan utama dalam usaha peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Patriarki tidak hanya terlihat dalam hubungan interpersonal di dalam rumah tangga, tetapi juga dalam struktur sosial yang lebih luas yang mengatur akses perempuan terhadap pendidikan, sumber daya, peluang kerja formal, dan jaringan sosial ekonomi yang memungkinkan partisipasi mereka secara penuh. Penelitian menunjukkan bahwa pola ketidaksetaraan ini berakar kuat dalam nilai budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, sehingga perlu pendekatan yang holistik dan lintas sektor untuk mengatasinya.

Konsep patriarki dalam konteks Indonesia juga berkaitan dengan ekspektasi sosial terhadap peran gender yang membatasi perempuan pada tanggung jawab domestik dan peran sosial tradisional. Norma budaya tersebut turut mempengaruhi bagaimana perempuan memperoleh hak partisipatif dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi maupun strategis. Hal ini terlihat dari tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan penting di lingkungan komunitas dan lembaga ekonomi formal yang masih rendah.

Struktur patriarki sering kali memperkuat stereotip gender yang membatasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga perempuan cenderung kurang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya finansial, pendidikan tinggi yang memadai, dan peluang kerja formal dibandingkan laki-laki. Ketimpangan akses ini menciptakan hambatan struktural yang mengurangi kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan ekonomi di berbagai tingkat. Perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan formal menjadi variabel penting yang perlu dianalisis ketika mengkaji keterlibatan perempuan dalam pengambilan

keputusan ekonomi, karena pendidikan merupakan modal penting dalam proses pemberdayaan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi juga dipengaruhi oleh literasi ekonomi dan keterampilan finansial, yang merupakan komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Studi tentang literasi keuangan gender menemukan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pengetahuan finansial, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan perempuan untuk membuat keputusan ekonomi yang strategis dan berkelanjutan. Tantangan ini menjadi semakin relevan ketika mempertimbangkan peran perempuan tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengelola keuangan keluarga dan pelaku usaha mikro.

Dalam ranah pembangunan ekonomi nasional, keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi masih sering dipandang sekunder dibandingkan kontribusi laki-laki, meskipun perempuan merupakan separuh dari populasi negara. Ketidaksetaraan dalam keterlibatan ini mencerminkan kurangnya representasi perempuan dalam posisi pengambilan keputusanstrategis, baik di sektor publik maupun swasta. Ketidakseimbangan representasi ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam ekonomi dan politik masih sangat dipengaruhi oleh norma patriarki yang membatasi perempuan untuk mencapai posisi pengaruh yang setara.

Aspek lain yang turut memperkuat struktur patriarki adalah pembagian kerja berdasarkan gender yang cenderung menempatkan perempuan pada perawatan dan pekerjaan tidak berbayar, sementara laki-laki lebih sering mengakses pekerjaan formal yang menawarkan stabilitas dan kontrol atas keputusan ekonomi. Ketimpangan jenis pekerjaan ini berkontribusi pada ketidaksetaraan pendapatan dan kapasitas perempuan untuk menegosiasikan keputusan ekonomi dalam keluarga maupun komunitas.

Dalam konteks ekonomi keluarga, penelitian lain menunjukkan bahwa keputusan ekonomi rumah tangga sering kali tetap didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan terlibat dalam berbagai aktivitas produktif. Dominasi ini merupakan cerminan adanya struktur kekuasaan yang menguatkan peran laki-laki sebagai pengambil keputusan utama, sedangkan perempuan hanya terlibat dalam diskusi tetapi tidak menentukan keputusan final. Ketimpangan ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga dan kesejahteraan perempuan itu sendiri.

Pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi masih perlu diperkuat melalui kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika gender. Kebijakan yang mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dapat membantu membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi di berbagai sektor. Upaya ini sejalan dengan temuan penelitian yang menekankan bahwa kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi dapat memperkuat struktur sosial dan ekonomi secara keseluruhan jika diberikan dukungan kebijakan yang tepat.

Analisis literatur tentang keterlibatan perempuan dalam keputusan ekonomi juga menyoroti pentingnya sinergi antara perubahan sosial, pendidikan gender, dan reformasi kebijakan untuk mengatasi hambatan struktural patriarki. Transformasi semacam ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung kesetaraan gender secara menyeluruh.

Akumulasi tantangan struktural dan budaya yang membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan perempuan perlu dirancang tidak hanya berdasarkan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhitungkan dinamika sosial dan norma patriarki yang terus berlanjut. Pendekatan kritis yang berfokus pada transformasi struktur kekuasaan gender menjadi penting dalam upaya memperluas ruang partisipasi perempuan di ranah ekonomi.

Pemahaman kritis terhadap keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh kajian literatur yang relevan, menunjukkan bahwa isu ini merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan keterkaitan antara struktur sosial, budaya patriarki, akses terhadap pendidikan dan sumber daya, serta

representasi dalam struktur kekuasaan. Pendekatan kajian pustaka seperti ini memungkinkan sintesis komprehensif dari berbagai temuan empiris untuk menjelaskan bagaimana dinamika gender dan patriarki berdampak pada proses pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia.

Meskipun partisipasi ekonomi perempuan terus meningkat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tersebut belum secara konsisten diikuti oleh peningkatan kewenangan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana partisipasi ekonomi benar-benar mencerminkan keberdayaan perempuan.

Sejauh ini, kajian gender dan ekonomi lebih banyak menekankan aspek partisipasi kerja, pendapatan, atau akses terhadap sumber daya, sementara pengambilan keputusan ekonomi sebagai indikator utama keberdayaan perempuan belum banyak dikaji secara sintesis, khususnya dalam konteks Indonesia. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan teori agensi dengan analisis kebijakan dan norma sosial masih relatif terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi melalui sintesis kajian literatur nasional dan internasional. Kontribusi artikel ini terletak pada penegasan pengambilan keputusan sebagai indikator kunci keberdayaan perempuan serta pada penguatan argumen bahwa pemberdayaan ekonomi tanpa transformasi relasi kuasa berisiko mereproduksi ketimpangan gender.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka *(library research)* untuk menganalisis secara kritis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara mendalam, khususnya relasi kuasa, makna, dan konstruksi sosial yang dibentuk oleh struktur patriarki dalam konteks ekonomi (Creswell, 2014). Metode Kajian Pustaka relevan digunakan untuk mengkaji isu gender dan ekonomi karena mampu mensintesis berbagai temuan empiris dan teoritis yang telah ada, sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif tanpa bergantung pada pengumpulan data lapangan secara langsung (Zed, 2014; Synder, 2019).

Sumber data Penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan lembaga yang relevan dengan tema gender, patriarki, dan pengambilan keputusan ekonomi. Pemilihan literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi topik, otoritas penulis, dan kontribusi teoritis terhadap kajian gender dan ekonomi politik. Penggunaan sumber sekunder yang kredibel menjadi aspek penting dalam kajian pustaka karena kualitas analisis sangat bergantung pada ketepatan dan keandalan literatur yang digunakan (Sugiyono,2019). Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kajian pustaka yang sistematis mampu memberikan dasar analitis yang kuat dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks, termasuk ketimpangan gender dalam struktur ekonomi (Tranifield 2003).

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi *(content analysis)* dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan tema-tema utama yang mucul dalam literatur yang dikaji. Tema-tema tersebut meliputi patriarki, relasi kekuasaan gender, partisipasi ekonomi perempuan, dan peran kebijakan publik dalam membentuk pengambilan keputusan ekonomi. Analisis dilakukan secara kritis untuk menelaah bagaimana wacana dan temuan penelitian mempresentasikan posisi perempuan dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Pendekatan analisis kritis ini memungkinkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu mengungkap ideologi dan struktur sosial yang melanggengkan ketimpangan gender, sebagaimana dianjurkan dalam penelitian kualitatif kritis berbasis literatur (Moleong, 2017; Fairchlough, 2013).

Tabel 1. Sintesis Analitis Kajian Literatur tentang Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi

Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Pendekatan / Metode	Temuan Utama	Kontribusi & Posisi dalam Artikel
Sen (1999)	Pembangunan dan kebebasan	Teoritis	Pembangunan harus memperluas kebebasan memilih individu	Menjadi landasan konseptual bahwa pengambilan keputusan adalah indikator utama keberdayaan
Kabeer (1999)	Agensi perempuan	Teoritis	Agensi ditentukan oleh akses sumber daya, kemampuan memilih, dan capaian	Digunakan untuk menganalisis keterbatasan keputusan ekonomi perempuan
Kabeer (2016)	Gender, ekonomi, dan patriarki	Teoritis-kritis	Kendala patriarki bersifat berulang lintas konteks	Memperkuat argumen struktural pembatasan keputusan perempuan
Beneria (2003)	Gender dan globalisasi	Kritis	Globalisasi meningkatkan kerja perempuan tanpa kontrol keputusan	Menjelaskan paradoks partisipasi ekonomi perempuan
Connell (2005)	Maskulinitas dan kekuasaan	Teoritis	Maskulinitas hegemonik melegitimasi dominasi laki-laki	Menjelaskan legitimasi sosial otoritas laki-laki dalam keputusan ekonomi
Cornwall (2007)	Gender dan pembangunan	Kritis kebijakan	Gender mainstreaming sering bersifat normatif	Menguatkan kritik terhadap kebijakan non-transformatif
Nugroho (2011)	Pengarusutamaan gender di Indonesia	Analisis kebijakan	PUG belum menyentuh relasi kuasa	Memberikan konteks nasional Indonesia
Sidauruk & Santari (2016)	Gender dan rumah tangga	Kualitatif	Keputusan ekonomi domestik masih didominasi laki-laki	Bukti empiris relasi kuasa domestik
Duflo (2012)	Gender dan pembangunan ekonomi	Kuantitatif	*Empowerment* berdampak jika disertai kontrol keputusan	Menegaskan pentingnya keputusan dalam pemberdayaan
World Bank (2020)	Hak ekonomi perempuan	Laporan global	Hambatan hukum membatasi keputusan ekonomi perempuan	Perbandingan lintas negara

World Economic Forum (2023)	Kesenjangan gender global	Indeks	Kesenjangan keputusan ekonomi masih signifikan	Menunjukkan urgensi isu secara global
BPS (2023)	Pemberdayaan gender Indonesia	Statistik nasional	Kesenjangan partisipasi dan keputusan ekonomi	Memperkuat relevansi empiris nasional
Mosse (2014)	Praktik kebijakan pembangunan	Etnografi kebijakan	Kesenjangan antara kebijakan dan praktik	Menjelaskan kegagalan implementasi kebijakan
Fairclough (2013)	Analisis wacana kritis	Metodologis	Diskursus mereproduksi relasi kuasa	Digunakan untuk membaca narasi kebijakan gender
Snyder (2019)	*Literature review*	Metodologis	Kajian pustaka sebagai metode ilmiah	Justifikasi metode penelitian
Tranfield (2003)	Kajian sistematis	Metodologis	Pentingnya sintesis sistematis	Kerangka metode kajian pustaka
Creswell (2014)	Desain penelitian	Metodologis	Pendekatan kualitatif mendalam	Landasan desain penelitian
Sugiyono (2019)	Metode kualitatif	Metodologis	Analisis fenomena sosial	Penguatan pendekatan metodologis
Zed (2014)	Kajian pustaka	Metodologis	Sistematisasi sumber pustaka	Justifikasi teknik pengumpulan data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh partisipasi ekonomi, tetapi terutama oleh struktur relasi kuasa gender yang bekerja di dalam rumah tangga dan institusi sosial. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat dipahami secara linier sebagai konsekuensi dari partisipasi ekonomi semata. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi sering kali tidak berbanding lurus dengan kewenangan pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun publik.

Studi Kabeer (1999) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam keputusan ekonomi harus dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu akses terhadap sumber daya, kapasitas agensi, dan capaian *(achievements)*. Dalam konteks Indonesia, banyak penelitian menunjukkan bahwa perempuan memang terlibat dalam aktivitas ekonomi, namun akses terhadap sumber daya strategis dan kontrol atas keputusan masih terbatas, sehingga agensi perempuan tidak berkembang secara optimal.

Temuan Uswatul Khasanah (2022) melalui analisis Program MAMPU menunjukkan bahwa peningkatan akses ekonomi perempuan tidak secara otomatis mengubah pola pengambilan keputusan rumah tangga. Dalam banyak kasus, keputusan strategis tetap berada di tangan laki-laki, sementara perempuan berperan sebagai pelaksana ekonomi, bukan pengambil keputusan utama. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi ekonomi tanpa perubahan relasi gender berpotensi melanggengkan ketimpangan.

Studi Nazla Zahra dkk. (2023) memperlihatkan adanya pergeseran peran gender dalam keluarga kelas menengah, khususnya pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi. Namun demikian, pergeseran tersebut bersifat parsial dan negosiatif, bukan transformasional, karena otoritas keputusan akhir masih sering berada pada pihak laki-laki.

Temuan internasional oleh Brenoe dan Ranehill (2024) memperkuat hasil kajian nasional dengan menunjukkan bahwa identitas gender memengaruhi preferensi risiko dan pola pengambilan keputusan ekonomi. Studi ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi bukan semata persoalan rasionalitas individu, tetapi juga dibentuk oleh konstruksi sosial gender yang dilembagakan. Secara struktural, Duflo (2012; 2023) menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hanya ketika disertai dengan penguatan hak ekonomi dan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan. Tanpa itu, partisipasi ekonomi perempuan berisiko menjadi eksploitasi terselubung dalam sistem patriarki.

Secara konseptual, Sen (1999) dan Kabeer (1999) menegaskan bahwa pembangunan dan partisipasi ekonomi harus dipahami dalam kerangka kebebasan, agensi, dan relasi kuasa. Dalam konteks ini, perempuan dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa memiliki kontrol atas sumber daya dan keputusan strategis. Temuan ini menjadi fondasi utama dalam memahami ketimpangan gender dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Studi-studi empiris di Indonesia menunjukkan pola yang relatif konsisten. Penelitian Sidauruk dan Saptari (2016) mengungkapkan bahwa meskipun perempuan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, keputusan ekonomi utama—seperti pengelolaan aset, investasi, dan penggunaan pendapatan—masih didominasi oleh laki-laki. Relasi patriarki dalam rumah tangga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Hasil kajian Nugroho (2011) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender di Indonesia cenderung bersifat normatif dan administratif, belum menyentuh transformasi relasi kuasa yang mendasari ketimpangan gender. Akibatnya, kebijakan yang bertujuan meningkatkan peran ekonomi perempuan sering kali gagal mendorong perubahan signifikan dalam struktur pengambilan keputusan.

Pada tingkat global, laporan World Bank (2020) dan World Economic Forum (2023) menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan ekonomi masih menjadi fenomena struktural lintas negara. Hambatan hukum, norma sosial, dan keterbatasan akses terhadap aset produktif menjadi faktor utama yang membatasi posisi tawar perempuan, termasuk di negara-negara dengan tingkat partisipasi kerja perempuan yang relatif tinggi.

Dengan demikian, hasil kajian ini mengindikasikan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan proses yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara struktur patriarki, norma sosial, kebijakan publik, dan kapasitas agensi individu. Literatur yang dikaji secara konsisten menegaskan bahwa tanpa perubahan struktural, partisipasi ekonomi perempuan berpotensi mereproduksi ketimpangan gender alih-alih menguranginya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengambilan Keputusan Ekonomi sebagai Indikator Substantif Keberdayaan Perempuan

Kajian literatur yang dianalisis dalam artikel ini secara konsisten menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi merupakan indikator yang lebih substantif dibandingkan sekadar partisipasi ekonomi atau kontribusi pendapatan perempuan. Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan harus dimaknai sebagai perluasan kebebasan untuk memilih, termasuk kebebasan menentukan keputusan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan individu. Dalam kerangka ini, perempuan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tetapi tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan sesungguhnya belum dapat dikategorikan sebagai berdaya secara substantif.

Kabeer (1999; 2016) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa agensi perempuan tidak hanya ditentukan oleh akses terhadap sumber daya, tetapi oleh kemampuan

untuk menggunakan sumber daya tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana perempuan sering terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi rumah tangga dan informal, tetapi tetap memiliki posisi tawar yang lemah dalam menentukan penggunaan pendapatan, investasi, maupun pengelolaan aset keluarga.

Dengan demikian, pengambilan keputusan ekonomi menjadi arena krusial yang merefleksikan relasi kuasa gender. Ketika keputusan strategis masih didominasi oleh laki-laki, maka partisipasi ekonomi perempuan berpotensi hanya memperluas beban kerja tanpa memperkuat posisi tawar mereka. Hal ini menegaskan bahwa indikator keberdayaan perempuan harus bergeser dari ukuran kuantitatif menuju dimensi relasional dan struktural.

3.2.2 Patriarki sebagai Struktur Pembatas Agensi dalam Keputusan Ekonomi

Hasil sintesis terhadap kajian Connell (2005), Beneria (2003), serta Sidauruk dan Saptari (2016) menunjukkan bahwa patriarki bekerja sebagai sistem sosial yang mereproduksi dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan ekonomi. Patriarki tidak hanya beroperasi melalui norma budaya, tetapi juga dilembagakan dalam pembagian kerja berbasis gender, legitimasi otoritas laki-laki, serta kontrol terhadap sumber daya ekonomi strategis.

Dalam konteks rumah tangga, studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan sering kali terlibat dalam diskusi ekonomi, tetapi tidak memiliki kewenangan final dalam pengambilan keputusan penting seperti investasi, pembelian aset, atau alokasi pendapatan besar. Pola ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan bersifat konsultatif, bukan determinatif. Situasi tersebut menguatkan tesis bahwa patriarki tidak selalu bersifat represif secara eksplisit, tetapi bekerja melalui mekanisme konsensus semu yang tetap mempertahankan hierarki gender.

Secara struktural, patriarki juga diperkuat oleh maskulinitas hegemonik (Connell, 2005) yang menempatkan laki-laki sebagai figur rasional, berani mengambil risiko, dan layak memegang kontrol ekonomi. Sementara itu, perempuan dikonstruksikan sebagai pihak yang berhati-hati, emosional, dan lebih cocok mengelola ranah domestik. Konstruksi ini berdampak langsung pada pembatasan legitimasi sosial perempuan sebagai pengambil keputusan ekonomi.

3.2.3 Paradoks Partisipasi Ekonomi dan Keterbatasan Keputusan

Salah satu temuan penting dari kajian literatur adalah munculnya paradoks antara meningkatnya partisipasi ekonomi perempuan dan stagnannya kewenangan dalam pengambilan keputusan. Duflo (2012; 2023) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan tidak secara otomatis menghasilkan pemberdayaan apabila tidak diikuti oleh penguatan kontrol dan hak ekonomi.

Fenomena ini juga terlihat dalam konteks global sebagaimana dilaporkan oleh World Bank (2020) dan World Economic Forum (2023). Negara dengan tingkat partisipasi kerja perempuan yang tinggi belum tentu memiliki tingkat keterlibatan perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan ekonomi. Hambatan hukum, norma sosial, dan ketimpangan akses terhadap aset produktif menjadi faktor pembatas utama.

Dalam konteks Indonesia, data BPS (2023) memperlihatkan bahwa meskipun terdapat peningkatan indeks pemberdayaan gender, kesenjangan dalam pengambilan keputusan ekonomi masih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan kuantitatif belum sepenuhnya mencerminkan perubahan kualitas relasi kuasa gender. Dengan demikian, partisipasi ekonomi tanpa transformasi struktural berisiko mereproduksi ketimpangan gender dalam bentuk yang lebih subtil.

3.2.4 Keterbatasan Pendekatan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Analisis kritis terhadap kebijakan pembangunan gender di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif dan teknokratis. Nugroho (2011) dan Cornwall et al. (2007) menegaskan bahwa pengarusutamaan gender sering direduksi menjadi pemenuhan indikator administratif, bukan sebagai strategi transformasi relasi kuasa.

Mosse (2014) menunjukkan bahwa praktik kebijakan pembangunan sering kali gagal menjembatani kesenjangan antara wacana kesetaraan gender dan realitas sosial. Dalam banyak kasus, kebijakan pemberdayaan perempuan berfokus pada peningkatan keterampilan ekonomi tanpa menyasar norma patriarki yang membatasi kewenangan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Akibatnya, program pemberdayaan berpotensi menghasilkan perempuan yang lebih produktif secara ekonomi, tetapi tetap berada dalam posisi subordinat secara struktural. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan harus dirancang sebagai proses politis yang menantang relasi kuasa, bukan sekadar intervensi ekonomi individual.

3.2.5 Sintesis Kritis: Keputusan Ekonomi sebagai Titik Temu Partisipasi, Agensi, dan Kekuasaan

Dengan mensintesis 19 kajian yang dianalisis, artikel ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi merupakan titik temu antara partisipasi ekonomi, agensi individu, dan struktur kekuasaan gender. Berbeda dari kajian yang memisahkan dimensi ekonomi dan sosial, artikel ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi adalah arena di mana ketimpangan gender diproduksi, dinegosiasikan, dan berpotensi ditransformasikan.

Pendekatan ini memperkaya kajian gender dan pembangunan dengan menempatkan keputusan ekonomi sebagai indikator kunci keberdayaan perempuan. Kontribusi utama artikel ini terletak pada penegasan bahwa tanpa penguatan kewenangan pengambilan keputusan, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan berisiko menjadi bentuk baru dari subordinasi yang terselubung.

Oleh karena itu, transformasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi membutuhkan strategi multidimensional yang mencakup reformasi kebijakan, perubahan norma sosial, serta penguatan kesadaran kritis terhadap relasi kuasa gender. Tanpa upaya tersebut, ketimpangan gender dalam keputusan ekonomi akan terus direproduksi meskipun partisipasi ekonomi perempuan meningkat.

3.2.6 Negosiasi Gender dan Pengambilan Keputusan Ekonomi dalam Rumah Tangga

Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi perempuan tidak selalu berada dalam pola dominasi atau subordinasi yang kaku, melainkan sering berlangsung melalui proses negosiasi gender yang bersifat dinamis. Kabeer (2016) menegaskan bahwa agensi perempuan kerap diekspresikan dalam bentuk negosiasi sehari-hari yang tidak selalu terlihat sebagai perubahan struktural yang eksplisit. Namun, negosiasi ini sering kali terjadi dalam batasan norma patriarki yang tetap memberikan legitimasi akhir pada otoritas laki-laki.

Dalam konteks rumah tangga Indonesia, beberapa kajian empiris menunjukkan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki ruang negosiasi yang lebih luas dalam keputusan ekonomi. Akan tetapi, ruang tersebut masih bersifat kondisional dan dapat menyempit ketika keputusan menyangkut aset strategis atau kepemimpinan ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi gender belum sepenuhnya menggeser struktur kekuasaan, melainkan berfungsi sebagai mekanisme adaptif dalam sistem patriarki.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam keputusan ekonomi melalui negosiasi tidak dapat secara otomatis diartikan sebagai keberdayaan penuh. Negosiasi yang tidak diikuti oleh redistribusi otoritas keputusan justru berpotensi menormalisasi ketimpangan dalam bentuk yang lebih halus dan sulit diidentifikasi.

3.2.7 Dimensi Interseksionalitas dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Perempuan

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak bersifat homogen, melainkan dipengaruhi oleh faktor interseksional

seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, lokasi geografis, dan sektor pekerjaan. Beneria (2003) menegaskan bahwa perempuan kelas bawah dan pekerja sektor informal menghadapi hambatan ganda dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di ranah domestik maupun publik.

Dalam konteks Indonesia, perempuan di wilayah pedesaan dan sektor informal sering kali berkontribusi signifikan terhadap ekonomi keluarga, tetapi memiliki kontrol yang sangat terbatas atas pendapatan yang dihasilkan. Sementara itu, perempuan kelas menengah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan dan pekerjaan formal, namun tetap menghadapi pembatasan normatif terkait kepemimpinan ekonomi dan otoritas keputusan strategis.

Pendekatan interseksional ini penting untuk menghindari generalisasi yang menyederhanakan pengalaman perempuan. Dengan memahami variasi posisi sosial perempuan, analisis pengambilan keputusan ekonomi menjadi lebih sensitif terhadap kompleksitas relasi kuasa yang bekerja dalam konteks sosial yang berbeda.

3.2.8 Pengambilan Keputusan Ekonomi Perempuan dalam Ranah Publik dan Kebijakan

Selain di tingkat rumah tangga, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi di ranah publik juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan. World Economic Forum (2023) mencatat bahwa representasi perempuan dalam posisi pengambil keputusan ekonomi strategis—seperti pembuat kebijakan fiskal, manajer senior, dan pimpinan lembaga ekonomi—masih relatif rendah secara global, termasuk di Indonesia.

Kajian Nugroho (2011) dan Mosse (2014) menunjukkan bahwa rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi publik tidak hanya disebabkan oleh hambatan individual, tetapi juga oleh budaya organisasi dan struktur institusional yang bias gender. Struktur tersebut sering kali mengasumsikan kepemimpinan ekonomi sebagai ranah maskulin, sehingga membatasi peluang perempuan untuk memengaruhi arah kebijakan ekonomi.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada perumusan kebijakan ekonomi yang kurang sensitif gender. Ketika perempuan tidak terlibat secara substantif dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan cenderung mengabaikan pengalaman dan kebutuhan spesifik perempuan, sehingga memperkuat ketimpangan struktural yang sudah ada.

3.2.9 Literasi Ekonomi, Pengetahuan Finansial, dan Otoritas Keputusan

Literasi ekonomi dan pengetahuan finansial muncul sebagai faktor penting yang memengaruhi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa perempuan dengan literasi finansial yang lebih tinggi memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi yang kompleks, seperti investasi dan perencanaan keuangan jangka panjang.

Namun demikian, literasi ekonomi saja tidak cukup untuk menjamin kewenangan keputusan. Norma patriarki sering kali tetap membatasi legitimasi perempuan sebagai pengambil keputusan, meskipun mereka memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi bukan semata persoalan kapasitas kognitif, tetapi juga pengakuan sosial terhadap otoritas perempuan.

Temuan ini menegaskan bahwa program peningkatan literasi ekonomi perempuan harus disertai dengan upaya perubahan norma sosial dan relasi kuasa. Tanpa itu, peningkatan pengetahuan finansial berisiko hanya meningkatkan beban tanggung jawab perempuan tanpa memperluas kewenangan mereka dalam pengambilan keputusan.

3.2.10 Reproduksi Ketimpangan Gender melalui Praktik Ekonomi Sehari-hari

Kajian literatur juga menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pengambilan keputusan ekonomi direproduksi melalui praktik ekonomi sehari-hari yang tampak netral. Pembagian kerja domestik, pengelolaan keuangan rumah tangga, dan prioritas pengeluaran sering kali mencerminkan asumsi gender yang tidak setara.

Fairclough (2013) menekankan bahwa wacana ekonomi sehari-hari berperan dalam memproduksi dan melegitimasi relasi kuasa. Dalam konteks ini, narasi tentang "kepala keluarga" atau "penanggung jawab ekonomi" sering digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki dalam keputusan ekonomi, meskipun kontribusi ekonomi perempuan signifikan.

Dengan membaca praktik ekonomi sehari-hari sebagai arena wacana, analisis ini menunjukkan bahwa perubahan pengambilan keputusan ekonomi perempuan membutuhkan dekonstruksi narasi sosial yang telah mengakar. Tanpa perubahan pada level diskursif, intervensi struktural berisiko kehilangan efektivitas jangka panjang.

3.2.11 Implikasi Teoretis dan Arah Pengembangan Kajian

Tambahan pembahasan ini memberikan implikasi teoretis penting bagi kajian gender dan ekonomi. Pertama, pengambilan keputusan ekonomi perlu diposisikan sebagai variabel analitis utama, bukan variabel turunan dari partisipasi ekonomi. Kedua, pendekatan interseksional dan diskursif menjadi krusial untuk memahami bagaimana ketimpangan gender direproduksi dalam konteks yang berbeda.

Artikel ini memperluas kontribusi kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberdayaan ekonomi perempuan merupakan proses yang bersifat relasional, kontekstual, dan politis. Dengan demikian, pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi individu, tetapi juga struktur sosial dan kekuasaan yang lebih luas.

3.2.12 Pengambilan Keputusan Ekonomi sebagai Arena Produksi dan Reproduksi Kekuasaan Gender

Kajian Fairclough (2013) memberikan landasan penting untuk membaca pengambilan keputusan ekonomi sebagai praktik diskursif yang memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa gender. Dalam konteks ini, keputusan ekonomi tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan makna sosial yang dilekatkan pada peran gender. Bahasa, simbol, dan narasi yang digunakan dalam praktik ekonomi—baik di rumah tangga maupun institusi—berkontribusi pada legitimasi otoritas laki-laki sebagai pengambil keputusan utama.

Dalam praktik sehari-hari, keputusan ekonomi sering dibingkai sebagai tanggung jawab "kepala keluarga", sebuah istilah yang secara implisit merujuk pada laki-laki. Diskursus ini berfungsi sebagai mekanisme normalisasi ketimpangan, sehingga dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan ekonomi diterima sebagai sesuatu yang wajar. Perempuan yang terlibat aktif dalam pengelolaan ekonomi sering kali tetap diposisikan sebagai pelaksana teknis, bukan subjek pengambil keputusan strategis.

Dengan demikian, analisis pengambilan keputusan ekonomi perempuan perlu melampaui pendekatan material dan memasukkan dimensi diskursif. Tanpa pembacaan kritis terhadap wacana yang melingkupi praktik ekonomi, upaya pemberdayaan berisiko gagal mengubah struktur kekuasaan yang bekerja secara simbolik.

3.2.13 Ketimpangan Keputusan Ekonomi dalam Perspektif Pembangunan dan Kebebasan

Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan sejati harus diukur dari sejauh mana individu memiliki kebebasan substantif untuk menentukan pilihan hidupnya. Dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi, kebebasan tersebut mencakup kemampuan perempuan untuk menentukan penggunaan sumber daya, arah investasi, dan prioritas ekonomi jangka panjang.

Namun, kajian literatur menunjukkan bahwa kebebasan ini masih sangat terbatas bagi perempuan, terutama dalam konteks masyarakat patriarkal. Perempuan dapat berkontribusi terhadap ekonomi keluarga tanpa memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana kontribusi tersebut digunakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi ekonomi dan kebebasan substantif.

Dengan menggunakan kerangka Sen, artikel ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan prasyarat penting bagi

pembangunan yang berkeadilan. Tanpa penguatan kebebasan substantif perempuan, pembangunan ekonomi berisiko hanya memperluas ketimpangan dalam bentuk yang lebih tersembunyi.

3.2.14 Relasi antara Struktur Ekonomi Global dan Keputusan Ekonomi Perempuan

Beneria (2003) menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi telah meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, terutama di sektor informal dan padat karya. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kewenangan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Dalam konteks Indonesia, keterlibatan perempuan dalam ekonomi global—melalui industri manufaktur, UMKM, dan ekonomi digital—sering kali berlangsung dalam kondisi kerja yang tidak stabil dan minim perlindungan. Kondisi ini membatasi kapasitas perempuan untuk mengonsolidasikan posisi tawar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, struktur ekonomi global turut membentuk batasan agensi perempuan di tingkat lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi perempuan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi politik global. Analisis yang mengabaikan dimensi ini berisiko menyederhanakan persoalan menjadi isu individual semata.

3.2.15 Kesenjangan antara Kerangka Kebijakan dan Realitas Keputusan Ekonomi

Kajian Mosse (2014) menyoroti adanya kesenjangan yang persisten antara kerangka kebijakan pembangunan dan praktik sosial di lapangan. Dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi perempuan, kebijakan sering kali mengadopsi bahasa kesetaraan gender, tetapi implementasinya tidak menantang struktur kekuasaan yang ada.

Hal ini terlihat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat, tetapi tidak mengubah mekanisme pengambilan keputusan dalam rumah tangga maupun komunitas. Perempuan diberi akses terhadap modal atau pelatihan, namun tetap tidak dilibatkan secara substantif dalam penentuan arah penggunaan sumber daya tersebut.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan masih beroperasi dalam kerangka instrumental, bukan transformatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ekonomi perlu dijadikan indikator evaluasi utama keberhasilan kebijakan gender, bukan sekadar tingkat partisipasi atau akses program.

3.2.16 Pengambilan Keputusan Ekonomi dan Maskulinitas Hegemonik

Connell (2005) menekankan bahwa maskulinitas hegemonik berperan penting dalam mempertahankan dominasi laki-laki di berbagai ranah sosial, termasuk ekonomi. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, maskulinitas hegemonik dilegitimasi melalui asumsi bahwa laki-laki lebih rasional, berani mengambil risiko, dan layak memegang kendali.

Asumsi ini berdampak langsung pada pembatasan peran perempuan dalam keputusan ekonomi strategis. Bahkan ketika perempuan memiliki kompetensi dan pengalaman yang setara, legitimasi sosial terhadap otoritas keputusan mereka sering kali dipertanyakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi merupakan arena di mana maskulinitas hegemonik diproduksi dan dipertahankan.

Dengan demikian, transformasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi juga menuntut kritik terhadap konstruksi maskulinitas yang dominan. Tanpa dekonstruksi maskulinitas hegemonik, perubahan struktural berisiko berjalan parsial dan tidak berkelanjutan.

3.2.17 Implikasi Konseptual untuk Agenda Pembangunan Berkeadilan Gender

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, pengambilan keputusan ekonomi perempuan harus diposisikan sebagai agenda strategis dalam pembangunan berkeadilan gender. Intervensi ekonomi yang mengabaikan dimensi keputusan berisiko menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dan tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, agenda pembangunan perlu mengintegrasikan indikator pengambilan keputusan ekonomi perempuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan output, tetapi juga mentransformasi relasi kuasa yang selama ini membatasi perempuan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi harus dipahami sebagai isu relasi kekuasaan, bukan sekadar persoalan kehadiran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Kerangka *development as freedom* (Sen, 1999) memberikan landasan teoretis bahwa pembangunan sejati menuntut perluasan kebebasan substantif, termasuk kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan ekonomi secara otonom.

Dalam konteks Indonesia, temuan Sidauruk dan Saptari (2016) menunjukkan bahwa struktur patriarki domestik masih menjadi faktor dominan yang membatasi agensi perempuan. Bahkan ketika perempuan menjadi pencari nafkah utama, legitimasi sosial terhadap otoritas keputusan tetap melekat pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi belum cukup untuk menggeser hierarki gender yang telah mengakar.

Analisis Nugroho (2011) mengindikasikan bahwa kebijakan pengarusutamaan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi substantif. Fokus kebijakan cenderung berada pada peningkatan partisipasi perempuan tanpa diiringi upaya sistematis untuk mendekonstruksi norma gender dan relasi kuasa yang tidak setara. Akibatnya, kebijakan tersebut belum mampu mendorong transformasi struktural dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan konteks global, laporan World Bank (2020) menunjukkan bahwa negara-negara dengan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak ekonomi perempuan cenderung memiliki tingkat keterlibatan perempuan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan World Economic Forum (2023) menegaskan bahwa kemajuan formal tersebut masih sering terhambat oleh norma sosial dan praktik budaya yang diskriminatif.

Pembahasan ini memperkuat argumen bahwa peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi memerlukan pendekatan multidimensional. Intervensi kebijakan harus melampaui peningkatan partisipasi ekonomi menuju strategi transformatif yang menargetkan perubahan norma sosial, distribusi kekuasaan, dan akses terhadap sumber daya produktif. Tanpa pendekatan tersebut, keterlibatan ekonomi perempuan berisiko menjadi simbolik dan tidak berkelanjutan.

Sintesis Tematik Kajian tentang Pengambilan Keputusan Ekonomi Perempuan

Berdasarkan kajian terhadap literatur yang dianalisis, temuan penelitian dapat dipetakan ke dalam tiga tema utama. Pertama, kajian yang menekankan hubungan antara partisipasi ekonomi dan agensi perempuan, yang menunjukkan bahwa keterlibatan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan kewenangan pengambilan keputusan (Sen, 1999; Kabeer, 1999; Duflo, 2012).

Kedua, kajian yang menyoroti peran struktur patriarki dan norma sosial dalam membatasi pengambilan keputusan ekonomi perempuan. Studi Connell (2005), Sidauruk dan Saptari (2016), serta Nugroho (2011) menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dilegitimasi secara kultural dan institusional.

Ketiga, kajian kritis pembangunan gender yang menggarisbawahi keterbatasan pendekatan kebijakan yang bersifat normatif dan teknokratis. Cornwall et al. (2007), Mosse (2014), dan Beneria (2003) menegaskan bahwa tanpa transformasi relasi kuasa, kebijakan pemberdayaan perempuan berpotensi menghasilkan perubahan yang dangkal.

Dengan memetakan kajian ke dalam tema-tema tersebut, artikel ini menempatkan dirinya sebagai upaya sintesis kritis yang menjembatani pendekatan ekonomi, sosiologis, dan kebijakan dalam memahami pengambilan keputusan ekonomi perempuan. Berbeda dari studi yang

berfokus pada satu dimensi tertentu, artikel ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan titik temu antara partisipasi ekonomi, norma gender, dan relasi kuasa struktural.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi di Indonesia masih dibatasisecara signifikan oleh struktur patriarki yang mengakar dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi merupakan isu struktural yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi kuasa gender dalam masyarakat Indonesia. Melaui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari keterkaitan antara norma budaya, struktur sosial, dan sistem ekonomi yang saling menguatkan.

Temuan-temuan dalam literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan ekonomi menjadi arena penting dalam memproduksi atau menantang ketimpangan gender. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan ranah ini tidak hanya mempresentasikan partisipasi ekonomi, tetapi juga mencerminkan posisi sosial dan politik perempuan dalam struktur sosial dan politik perempuan dalam struktur masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpilkan bahwa upaya meningkatkan keterlibatan keputusan ekonomi menuntut perubahan yang bersifat transformatif, bukan sekadar peningkatan kapasitas individu. Perubahan tersebut harus menyasar struktur sosial dan norma patriarki yang membatasi ruang agensi perempuan, agar tercipta relasi ekonomi yang lebih setara dan berkeadilan.

Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan perspektif gender dalam perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi, sehingga proses pengambilan keputusan tidak lagi bersifat eksklusif dan hierarkis. Integrasi prinsip kesetaraan gender dalam kebijakan diharapkan mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih substantif bagi perempuan.

Selain itu, diperlukan strategi jangka panjang yang menitikberatkan pada perubahan norma sosial melalui pendidikan dan penguatan kesadaran kritis masyarakat. Upaya ini penting untuk menggeser konstruksi gender yang selama ini membatasi peran perempuan dalam ranah ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun publik. Artikel ini mensintesis berbagai kajian lintas disiplin dan konteks, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kompleksitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Bagi pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi pendekatan interdisipliner guna memahami keterkaitan antara gender, ekonomi, dan kekuasaan secara lebih mendalam. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya kerangka analitis dan menghasilkan rekomendasi yang lebih kontekstual dan aplikatif.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penulisan artikel yang berbasis kajian pustaka. Penghargaan disampaikan kepada para penulis dan peneliti sebelumnya yang karyanya menjadi rujukan penting dalam pengembangan kajian pada artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan akademik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga artikel ini dapat disusun dan disempurnakan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keerbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk pengembangan kajian selanjutnya. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademik terkait.

6. DAFTAR PUSTAKA

Beneria, L. (2003). Gender, development, and globalization: Ecocomics as if all people mattered. New York: Routledge.

BPS. (2023). Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nded.). Berkeley: University of Callifornia Press.

Cornwall, A., Harrison, E., S Whitehead, A. (2007). Gender myths and feminist fables: The struggle for interpretive power in gender and development. Oxford: Blackwell Publishing.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.

Duflo, E. (2012). Women empoerment and economic development. Journal of Economic Literature,

50(4),1051-1079. https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051 Fairchlough, N. (2013). Critical Discourse Analysis

Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empoerment. Development andChange,30(3),435-464. https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125

Kabeer, N. (2016). Gender equality, economic growth, and women's agency: The "endless variety" and "monotonous similiarity" of patriarchal constraints. Feminist Economics, 22(1), 295-321. https://doi.org/10.1080/13545701.2015.1090009

Mosse, D. (2014). Cultivating development: An ethnography of aid policy and practice. London: Pluto Press.

Nugroho, R. (2011). Gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sen A. (1999). Development as freedom. New York: Knopf. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif.

Synder, H. (2019). Literature review as a research methodology. Journal of Management knowledge. British Journal of Management.

Sidauruk, R., S Saptari, R. (2016). Gender, kerja, dan kekuasaan dalam rumah tangga. Jurnal Antropologi Indonesia, 37(2), 89-104.

Tranfield, D., Denyer, D., S Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-infomed management knowledge. British Journal of Management.

World Bank, (2020). Women, bussiness and the law 2020. Washington, DC: World Bank.

World Economic, Forum. (2023). Global Gender Gap Reportv2023. Geneva: World Economic Forum.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kualitatif.